

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA  
SELASA, 1 MARET 2011**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  
Dengan : Pimpinan Gereja-Gereja di Tanah Papua.  
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Maret 2011  
Pukul : 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)  
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Waki Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : Audiensi terkait dengan Otonomi Khusus Papua dan Proses Pemilihan Majelis Rakyat Papua  
Kehadiran : 2 Anggota Komisi II DPR RI  
10 Delegasi Gereja-Gereja di Tanah Papua

**HADIR :**

- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Agustina Basik Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Gereja-Gereja di Tanah Papua dibuka pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/PDI Perjuangan.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

- Delegasi menyampaikan pendapat terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang dinilai telah gagal, seperti yang telah disampaikan secara terbuka pada Musyawarah antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat Asli Papua pada tanggal 9-10 Juni 2010 di kantor MRP. Pemerintah tekesan setengah hati dalam melaksanakan Otsus Papua, seperti terlihat dalam proses pemilihan anggota MRP saat ini yang dinilai cenderung tergesa-gesa dan dipaksakan oleh pemerintah sendiri. Padahal MRP merupakan 'jantung' dari Otsus. Pembentukan tim sosialisasi MRP dinilai diisi oleh orang-orang/ pihak yang berkompeten karena tidak melibatkan unsur

perguruan tinggi negeri dan gereja di Papua, padahal pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang ikut sejak awal terlibat dalam merancang Otonomi Khusus, sehingga diharapkan pihak-pihak tersebut dapat mengawal dengan baik roh dasar lahirnya Otonomi Khusus. Pada kenyataannya tim sosialisasi justru diisi oleh unsur Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua) yang dinilai dapat menciptakan kanggootaan MRP yang tidak independen, yang tidak dapat /mampu untuk melakukan pemihakan, perlindungan, dan menegakkan hak-hak dasar Rakyat Asli Papua.

- Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Gereja-Gereja di Tanah Papua menyatakan sikap :
  - a. Menghormati aspirasi masyarakat Papua seperti yang telah disampaikan pada tanggal 9-10 Juni 2010 di kantor MRP di Jayapura, bahwa Otonomi Khusus Papua telah gagal, dan dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Untuk menghormati aspirasi tersebut, maka delegasi mendesak Presiden RI, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua dan Ketua DPR Papua Barat untuk segera menghentikan seluruh proses persiapan, penyelenggaraan seleksi MRP di tanah Papua hingga sebelum adanya jawaban konkrit terhadap hasil Musyawarah MRP dimaksud yang diserahkan ke DPR Papua pada tanggal 18 Juni 2010.
  - c. Mendesak Pemerintah RI untuk mengadakan dialog dengan rakyat Papua guna menyelesaikan ketidakpastian hukum dan politik di tanah Papua.
  - d. Menolak upaya-upaya, rumusan-rumusan atau istilah-istilah apapun yang bertujuan mengaburkan dan mengacaukan adanya tuntutan dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah RI.

### **III. PENUTUP**

Menyampaikan terima kasih atas kedatangan delegasi, dan mengharapkan agar aspirasi yang tadi telah disampaikan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, dan terkait dengan permohonan untuk diadakan dialog antara Pemerintah RI dengan Rakyat Papua, Komisi II DPR RI mengharapkan agar delegasi dapat membuat suatu matrik yang berisi pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam dialog dimaksud beserta daftar inventaris masalah dan solusi penyelesaian yang diharapkan.

Aspirasi dimaksud akan disampaikan pada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang menjadi mitra Komisi II DPR RI.

**Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.**

**JAKARTA, 1 MARET 2011  
PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
WAKIL KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO  
A-365**